

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN SARANA PRASARANA BERBASIS SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP AL-ISLAM KRIAN KABUPATEN SIDOARJO)

Idris Yudi Citra<sup>1)</sup>, Aris Sunarya<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: idris.yudi.citra1@gmail.com

### ABSTRAK

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sarana prasarana sekolah perlu dipelihara dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang. Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang milik negara yang dikuasai atau diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib, dan lengkap. Kepala sekolah melakukan dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada di sekolahnya. Penghapusan sarana dan prasarana harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi manajemen sarana prasarana berbasis sekolah selama ini belum banyak dilakukan. Selama ini penelitian yang bersifat pengembangan model, banyak mengembangkan model pembelajarannya saja. evaluasi terhadap manajemen perpustakaan berbasis pembelajaran kami pandang sangat sesuai untuk manajemen pendidikan. Yang memiliki kesimpulan proses perencanaan sarana implementasi manajemen sarana prasarana berbasis sekolah (studi kasus di SMP Al-Islam Krian Kabupaten Sidoarjo) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran. Kegiatan perencanaan perpustakaan di SMP Al-Islam Krian mengikutsertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait, yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, dan kepala laboratorium, kepala perpustakaan, pesuruh sekolah, serta pengawas sekolah.

**Kata Kunci:** Implementasi Manajemen, Sarana dan Prasarana Berbasis Sekolah, SMP Al-Islam

### Abstract

*Procurement of facilities and infrastructure is the first operational function in the management of school education facilities and infrastructure. This function is essentially a series of activities to provide school education facilities and infrastructure in accordance with the needs, both related to the type and specifications, quantity, time and place, at a price and source that can be accounted for. School infrastructure needs to be maintained properly. Maintenance of educational facilities and infrastructure is an activity to carry out management and arrangements so that all facilities and infrastructure are always in good condition and ready to be used efficiently and successfully in achieving educational goals. Maintenance is an activity of guarding or preventing damage to an item, so that the item is in good condition and ready to use. Maintenance includes all continuous efforts to keep the equipment in good condition. Maintenance starts with the use of goods. Each school is obliged to organize an inventory of state property controlled or managed by their respective schools in a regular, orderly and complete manner. The school principal conducts and is responsible for the implementation of the physical inventory and filling in the inventory list of state property in his/her school.*

*The elimination of facilities and infrastructure must be carried out based on applicable laws and regulations. Removal as one of the management functions of school education facilities and infrastructure must consider certain normative reasons in its implementation. Because the mouth of these various considerations is none other than for the effectiveness and efficiency of school activities. There has not been much research related to the implementation of school-based infrastructure management. So far, research in the nature of model development has developed a lot of learning models only. evaluation of learning-based library management we see is very suitable for education management. which has the conclusion that the planning process for the implementation of school-based infrastructure management facilities (case study at Al-Islam Krian Junior High School, Sidoarjo Regency) is carried out based on an analysis of learning needs. Library planning activities at Al-Islam Krian Junior High School include various elements or parties involved, namely the principal, vice principal, teachers, head of administration, and head of the laboratory, head of the library, school workers, and school supervisors.*

**Keywords: Management Implementation, School-Based Facilities and Infrastructure, Al-Islam Junior High School**

## A. LATAR BELAKANG

Banyak pakar administrasi pendidikan yang berpendapat bahwa manajemen itu merupakan kajian administrasi ditinjau dari sudut prosesnya. Para pakar administrasi pendidikan, seperti Sergiovanni, Burlingame, Coombs, dan Thurston (1987) mendefinisikan manajemen sebagai *process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently*, yaitu proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Manajemen itu merupakan proses, terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Gorton (1976) yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu.

Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta

berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah (Anon, 1996).

Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa:

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana untuk SMP mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini tertuang dengan jelas pada Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2021, dengan standar inilah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran di SMP/MTs seharusnya ada, berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjang proses belajar tersebut.

Menurut Terry (2005), perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Hal senada juga dikemukakan oleh Nana Sudjana (2002) bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, oleh Dwiantara dan Sumarto (2004) dikemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.

Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah: (1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, (2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Implementasinya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Studi implementasi dalam perspektif ini misalnya yang dilakukan oleh Edward III (1980) yang mengidentifikasi adanya 4 (empat) faktor determinan utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu komunikasi (*communication*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), sumberdaya (*resources*), dan disposisi (*disposition*) (Edward III, 1980).

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Arum, Wahyu Sri Ambar, 2007).

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sarana prasarana sekolah perlu dipelihara dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang (Arum, Wahyu Sri Ambar, 2007).

Inventarisasi atau melakukan pendaftaran barang-barang, bahan milik sekolah harus dilakukan dengan baik. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang

secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan atau dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang milik negara yang dikuasai/diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib, dan lengkap. Kepala sekolah melakukan dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada di sekolahnya. Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.

Pada saat tertentu perlu diadakan penghapusan terhadap sarana dan prasarana sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan Implementasi pembelajaran di sekolah (Anon,1996.).

Penghapusan sarana dan prasarana harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam Implementasinya. Oleh karena muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan.

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di

antaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai (Abdullah, S,2004).

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Kata perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan atau kerangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa yang akan datang. Menurut Terry (2005), perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Hal senada juga dikemukakan oleh Nana Sudjana (2002) bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, oleh Dwiantara dan Sumarto (2004) dikemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud adalah

merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

### C. METODE

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada *qualitative research*. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, suatu organisasi atau komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Sebagaimana dinyatakan oleh Guba & Lincoln (1989) bahwa penelitian kualitatif memang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan evaluatif, karena jenis dan desain penelitian pada pendekatan *naturalistic* pada umumnya relatif lebih leluasa dalam menjangkau dan menetapkan variabel-variabel penelitian.

Selanjutnya, secara tegas Lofland & Lyn (1984) menyatakan bahwa: “... *qualitative research seeks depth rather than breadth. instead of drawing from a large, representative sample of an entire population of interest, qualitative researchers seeks to acquire indepth an intimate information about a smaller group of persons ...*”.

Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah bahwa dampak kebijakan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang bisa dikuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari kebijakan tersebut. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan cara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti.

Dengan demikian melalui penelitian ini dapat dijelaskan secara terperinci jalan cerita secara kronologis, sehingga hasil akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada policy maker untuk merumuskan kembali sekaligus sebagai penyempurnaan suatu kebijakan yang akan diambil dan diimplementasikan.

Selanjutnya, seperti dijelaskan di awal bahwa pada hakikatnya kajian dan evaluasi ini berbasis penelitian kualitatif dengan prosedur serta tahap-tahap yang sesuai dengan ‘kultur’ pendekatan naturalistik. Akan tetapi dalam penerapannya acapkali tahapan-tahapan tersebut secara ideal sulit dilakukan oleh karena terkendala oleh sejumlah faktor, antara lain seperti waktu dan cakupan masalah yang diteliti. Untuk menyasati kondisi tersebut, maka peneliti memilih untuk berkompromi dengan pendekatan kuantitatif khususnya dalam hal pengumpulan dan analisis data. Dengan tetap bertumpu pada *Focus Group Discussion* (FGD) serta *indepth interview* kepada para informan sebagaimana direkomendasikan dalam arus kualitatif.

Peneliti juga menggunakan instrumen kuesioner yang populer dalam ranah pendekatan kuantitatif dan statistik untuk menjangkau sejumlah data kepada responden. Oleh Chaedar (2002) dalam bukunya yang berjudul *Pokoknya Kualitatif*, dinyatakan bahwa penggunaan instrumen statistik dalam penelitian yang berkarakter kualitatif bisa ditoleransi dalam upaya untuk melakukan triangulasi data serta memperoleh keandalan data yang juga berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus pembanding dengan data-data yang diperoleh secara kualitatif, sehingga data yang diperoleh berada atau mendekati puncak kejenuhan (*saturate*) (Moleong, 1986). Penggunaan instrumen statistik dalam riset kualitatif populer disebut dengan *quasi statistic* (Chaedar, 2002).

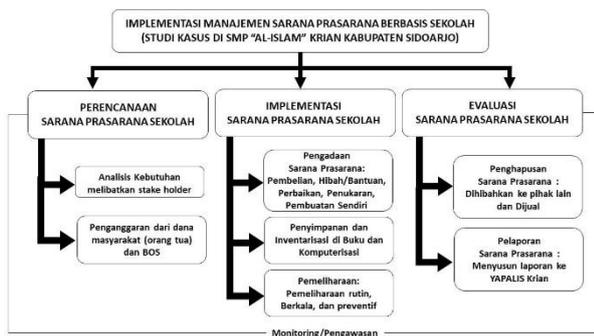
### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam hal ini pengamat sering larut dalam kegiatan partisipasinya sehingga kurang cermat dalam membuat catatan lapangan. Jika pengamat secara bertahap menganalisis data, maka hasil pengamatan sering mengalami kesulitan dan memakan waktu untuk

menganalisisnya. Di samping itu dalam pengamatan partisipatif, pengamat cenderung melakukan pengamatan secara tidak sistematis.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka peneliti mengupayakan dengan beberapa hal, diantaranya:

1. Membuat jadwal pengamatan dan membatasi waktu pengamatan secara tepat, hal ini dimaksudkan agar peneliti sempat mendeskripsikan data secara tuntas pada saat itu.
2. Membuat buku harian pengalaman/catatan lapangan dalam bentuk yang lebih terorganisasi dan harus diisi pada saat pengamatan dilakukan.
3. Menggunakan alat bantu perekam audio (*tape recorder*) penggunaan ini didasarkan oleh kesadaran adanya keterbatasan panca indra pendengaran sehingga perlu teknik untuk membantu ingatan.



**Gambar 4.1. Recommendation Model Implementasi Manajemen Sarana Prasarana Berbasis Sekolah**

Sumber: Diolah peneliti (2023)

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan sarana implementasi manajemen sarana prasarana berbasis sekolah (studi kasus di SMP Al-Islam Krian Kabupaten Sidoarjo) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran. Kegiatan perencanaan perpustakaan di SMP Al-Islam Krian mengikutsertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait, yakni kepala sekolah, wakil

kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, dan kepala laboratorium, kepala perpustakaan, pesuruh sekolah, serta pengawas sekolah.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang implementasi manajemen sarana prasarana berbasis sekolah (Studi kasus di SMP Al-Islam Krian Kabupaten Sidoarjo), maka ada beberapa poin penting yang bisa menjadi rekomendasi bagi *stakeholder* sekolah dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen sarana prasarannya yaitu:

- a) Melengkapi sekolah dengan ruang penyimpanan atau gudang.
- b) Melakukan pencatatan atau inventarisasi secara teratur.
- c) Melakukan monitoring atau kepengawasan pemakaian sarana prasarana sekolah pada setiap tahap manajemen sarana prasarana.

## REFERENSI

- Abdullah, S. (2004). *Pengelolaan Fasilitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, H. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aninda. (1996). *Pedoman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arum, W. S. A. (2007). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: CV. Multi Karya Mulia.
- Daft, R. L., & Steers, R. M. (1986). *Organization: A Micro/Macro Approach*. Glenview: Scott, Foresman and Company.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2006). *Rencana Strategis Dirjen PMPTK*. Jakarta: Dirjen PMPTK.

- Dwiantara, L., & Rumsari, H. S. (2004). *Manajemen Logistik: Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Flippo, & Edwin, B. (1961). *Principles of Personnel Management*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Gorton, & Richard, A. (1976). *School Administration*. New York: Wm. C. Brown Company Publishers.
- Hanafi, I., dkk. (2001). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Untuk Pelatihan Kepala Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- Heryati, Y., & Muhsin, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoy, W. K., & Ferguson, J. (1985). A Theoretical Framework and Explanation of Organizational Effectiveness of Schools. *Administration Quarterly*, 21(2), 117–132.

